

Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara

Fransiska WL¹, Muhammad Noor², Achmad Djumlani³

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis yang berkaitan dengan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus dalam penelitian, yaitu apa saja kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan, unit (SKPD) apa saja yang terlibat dan bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan. Tempat penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian, kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah ada serta sudah dijalankan, namun perlu adanya dievaluasi dan pengembangan sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi.

Kata Kunci: Kemiskinan, Program Penanggulangan, SKPD

Pendahuluan

Di Indonesia jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta orang (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta orang. Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2008, sebagian besar (63,47 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan (BPS,2008).

¹ Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Kebijakan pembangunan daerah selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun, karena karakteristik dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah lagi kurangnya koordinasi antar instansi teknis dan keterbatasan dari segipendanaan pembangunan sehingga kebijakan pemerintah daerah belum berhasil memecahkan permasalahan kelompok ekonomi di tingkat bawah (masalah kemiskinan). Kemiskinan dapat terjadi karena struktur sosial masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan juga dapat terjadi karena miskinnya strategi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.

Masalah kemiskinan senantiasa menghantui kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Terdapat banyak definisi kemiskinan, seperti kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan dikarenakan kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), bersama dengan pemerintah pusat selama ini, melalui berbagai program kebijakan, diantaranya adalah penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, pendidikan gratis, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan masyarakat miskin.

Namun dari pelaksanaan berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk penanggulangan kemiskinan sampai

saat ini masih banyak penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang miskin.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik

Administrasi publik menghadapi empat isu kritis, pertama struktur yang berkenaan dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintah (*best government is least government*). kedua, berkenaan dengan proses administrasi publik, yaitu yang memperhadapkan kenyataan bahwa sumber defisit terbesar disetiap negara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik. Ketiga, tentang nilai yang antara lain berkenaan dengan munculnya icon *entrepreneurial government*. Keempat, kapasitas yaitu yang berkenaan dengan isu kecakapan dari administrasi publik mememanajemeni urusan-urusan publik, Donald, (1996:9-15) dalam Riant, (2004:49). Keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan seberapa mampu negara tersebut menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor didalamnya, khususnya aktor ekonomi, (Porter 1998)

Kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada

masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi.

Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan (policy evaluation).

Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4)

Menurut Quibria dalam Tjokrowinoto (1996:103) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam suatu kondisi yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yakni kebutuhan pangan, pakaian dan tempat tinggal, dengan asumsi bahwa konsep kemiskinan ini bersifat *time and society spesific* artinya tidak berlaku universal karena secara konkrit masing-masing masyarakat, masing-masing kurun waktu, memiliki ukuran yang berbeda-beda tentang kemiskinan.

Sedangkan Kartasmita (1996:67) mengkategorikan kemiskinan menjadi 2 (dua) yaitu : “kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif”. miskin absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah dari pada garis kemiskinan absolut, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pada garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.

Beberapa pendekatan yang cukup populer dalam memahami kemiskinan. Menurut Ancok (1995:54) terdapat 3 (tiga) pendekatan yaitu :

1) Pendekatan *Cultural*, yang dibidani oleh Oscar Lewis (1996) dengan konsep *cultural poverty* yang memandang kemiskinan sebagai suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi yang berlangsung lama.

Secara teoristik, kemiskinan dipahami melalui akar penyebabnya yang dibedakan menjadi dua kategori : pertama, *kemiskinan alamiah*, yaitu sesuatu kemiskinan yang timbul akibat terbatasnya sumber atau tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Artinya, secara alamiah kemiskinan memang ada bukan adanya kelompok atau individu yang ada dalam masyarakat yang lebih miskin dari yang lain. Kedua, *kemiskinan buatan (artifisial)*, yaitu struktur sosial yang ada membuat masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Dalam arah selanjutnya, kemiskinan buatan inilah yang sering mengisi wacana para pakar sosial sebagai kemiskinan struktural (Mas'ood, 1994:89). Selanjutnya Mas'ood (1994:53) melihat ada beberapa mekanisme proses pemiskinan dari perspektif struktural, yaitu : (1) *Policy Bias*. Dimana kebijakan pemerintah cenderung mengutamakan kota. Mengistimewakan komoditi ekspor. Kebijakan harga pangan yang mengistimewakan bahan impor; (2) *proses-proses kelembagaan*. Kelangkaan akses ke tanah dan pengairan, peraturan bagi hasil dan sewa-menyewa tanah yang timpang. Pasar yang kurang berkembang. Kelangkaan kredit, input, kurangnya fasilitas pelatihan; (3) *dualisme ekonomi*, pengambilan sumber daya untuk mengembangkan pertanian komersial besar dan berorientasi ekspor, sementara petani kecil dan pinggiran tidak punya kesempatan berkembang; (4) *tekanan kependudukan*, yang berkaitan dengan kelangkaan tanah; (5) *manajemen sumber daya dan lingkungan*, yang sangat berkaitan dengan persoalan kelangkaan sumber daya alam; (6) *siklus dan proses alamiah*, berupa kelangkaan pangan yang bersifat musiman sehingga si miskin di pedesaan segera menjual hasil taninya meski dengan harga murah demi memenuhi kebutuhan jangka pendek dan membeli kembali ketika harga tinggi. Ini berarti hilangnya kesempatan untuk menabung bahkan menimbulkan persoalan hutang; (7) *marginalisasi* wanita, adanya diskriminasi wanita sehingga mereka sulit mendapatkan akses input, pelatihan atau kredit; (8) *tengkulak yang eksploitatif*, adanya berbagai jenis tengkulak yang eksploitatif seperti pemilik terhadap penggarap, pelepas uang terhadap peminjamnya, pedagang terhadap petani kecil; (9) *fragmentasi politik internal dan gejolak sosial*, suatu misal kemiskinan di Timor-Timur yang berkepanjangan yang diakibatkan kericuhan di daerah itu; (10) *proses internasional*, terjadi di suatu negara yang penghasilannya tergantung pada pasar internasional.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memiliki luas wilayah sekitar 27.263,10 Km² terletak pada garis bujur antara 115⁰26' Bujur

Timur sampai dengan 117°36' Bujur Timur serta terletak pada garis lintang dari 1°28' Lintang Utara sampai dengan 1°08' Lintang Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pemekaran wilayah, terbagi menjadi 18 Kecamatan, 237 desa dan 44 kelurahannya. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk, penduduk Kutai Kartanegara tahun 2011 adalah **650.908** jiwa yang terdiri atas 341.652 laki-laki dan 309.256 perempuan. Jumlah penduduk Kutai Kartanegara pada 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk sebanyak 626.680 jiwa sehingga penduduk Kutai Kartanegara diperkirakan tumbuh sebesar 3,87% pada tahun 2011. Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pemekaran wilayah, terbagi menjadi 18 Kecamatan, 237 desa dan 44 kelurahannya. Dalam menjalankan pemerintahannya Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan oleh 19 SKPD yang berbentuk Dinas, 4 Kantor Daerah dan 14 Badan Daerah.

Hasil Penelitian

Berdasarkan deskripsi data yang telah diuraikan secara normatif, maka dapatlah dikemukakan beberapa temuan penelitian pada penelitian Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum kebijakan operasional Penanggulangan Kemiskinan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
2. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian.
4. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari data dan informasi yang diberikan oleh responden tentang program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terungkap bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini berasal dari kebijakan program nasional pusat dan kebijakan program daerah (program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara).

Unit Pemerintah Daerah (SKPD) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, SKPD selama ini yang bekerjasama adalah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, Diknas Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinkes Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinsos Kabupaten Kutai Kartanegara, BKPP Kabupaten Kutai Kartanegara dan Itwil Kabupaten Kutai Kartanegara

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang permasalahan kemiskinan warganya adalah masalah yang sangat serius dan harus segera diselesaikan, hal tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan penurunan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2010 berjumlah 54.400 jiwa sedangkan pada tahun 2011 berjumlah 47.300 jiwa. Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara umum di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti SKPD Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain.

Program penanggulangan kemiskinan secara umum bukan hanya ada di Kabupaten Kutai Kartanegara saja, melainkan telah menjadi program internasional dan nasional serta daerah di Indonesia. Ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

1. Dinas Sosial, dengan kebijakan Sumbangan Warga Tidak Mampu (SWTM) dan "Bedah Rumah".
2. Dinas Kesehatan, dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
3. Dinas Pendidikan, Pendidikan Gratis dari Sekolah Dasar (SD) sampai SMU/SMA sederajat dan Perguruan Tinggi.
4. Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan kebijakan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) dan lain-lain.

Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai saat penelitian ini dilakukan adalah berbentuk program-program, yaitu : Secara umum kebijakan operasional Penanggulangan Kemiskinan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:
 - a. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
 - b. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian.
 - d. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. SKPD yang terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, Diknas Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinkes Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinsos Kabupaten Kutai Kartanegara, BKPP Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapemas dan Itwil Kabupaten Kutai Kartanegara
 3. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah dalam bentuk program :
 - a. Sumbangan Warga Tidak Mampu (SWTM).
 - b. "Bedah Rumah".
 - c. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
 - d. Pendidikan Gratis dari Sekolah Dasar (SD) sampai SMU/SMA sederajat dan Perguruan Tinggi.
 - e. Usaha Bersama Perempuan (KUBP) dan lain-lain.

Saran-Saran

1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ada saat ini hendaknya di evaluasi secara komprehensif, sehingga kebijakan yang dibuat untuk masa yang akan datang dapat lebih efektif.
2. Unit Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbentuk SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya diperbanyak, sehingga penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara bisa lebih komprehensif.
3. Sasaran atau ruang lingkup kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya lebih diperluas lagi, sehingga masyarakat miskin yang merasakan program-program kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut lebih banyak dan luas.
4. Dalam penyusunan Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPKD) perlu mempertimbangkan hasil evaluasi kebijakan dan dalam membuat strategi kebijakan harus tepat sasaran bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi serta perlunya monitoring terhadap implementasi program kebijakan tersebut

Daftar Pustaka

- Afri Awang, San, 1994, *Kemampuan dan Peran KSM dalam Proses Kesewadayaan*, Aditya Media, Yogyakarta
- Ancok, 1995, *Kualitas Manusia Dalam Menyongsong Era Tinggal Landas*, Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, Yogyakarta
- Bintoro, 1985, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Bryant, Coralie dan Loise G. White, 1982, *Managing Development in The Third World*, Wesview Press, Colorado
- Budiman, Arief, 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta
- Chambert, Robert, 1997, *Poverty and Livelihoods : Whose Reality Count ? , dalam Uner Kirdar and Leonard Silk, People from Impoverishment to Empowerment*, New York University Press
- Cohen, John, Uphoff, Norman T, 1977, *Rural Development Participation : Concepts Measures for Project Design, Implementation and Evaluation Rural*
- Dewanta, Awan Setya, et all, 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Dunn, William N, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Friedman, John, 1992, *Empowermen : The Politics Alternative Development*, Blacwell, Cambridge
- Furchan, Arief, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Usaha Nasional*, Surabaya
- Gunadibrata, Aloysius, 1996, *Ketidakadilan, Kemiskinan, dan Ekonomi*, dalam Johanes Mardimin, Kanisius, Jakarta
- Korten, DC. dan Syahrir, 1998, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, AMP YKPN, Yogyakarta
- Licoln, Yvonna dan Egon G. Guba, 1984, *Naturalitic Inquiry*, Beverly Hills, Sage Publication, London
- Mazmanian, Daniel H, & Paul A.Sabastiar, 1983, *Implementation and Public Policy*, Harper Collins, New York
- Mas'ood, Mochtar, 1994, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Miles, B.Mathew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta
- Moleong, J. Lexy, 2002, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhadjir Noeng, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta
- Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Gramedia, Jakarta
- Samodra, Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta